

Judul : MKD Memilih Abaikan Surat Novanto
Tanggal : Kamis, 23 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

MKD Memilih Abaikan Surat Novanto

● FAUZIAH MURSID, SANTI SOPIA

Fraksi-fraksi di DPR
meminta Golkar
bersikap arif.

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berjanji akan melanjutkan sidang dugaan pelanggaran sumpah jabatan oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menekankan, lembaganya tak bisa diintervensi surat itu ataupun putusan DPP Partai Golkar.

"Saya tegaskan, surat ini tak akan mengintervensi apa pun keputusan MKD," kata Sufmi saat dihubungi *Republika*, Rabu (22/11). Menurut Sufmi, siapa pun tidak boleh berupaya memengaruhi keputusan MKD, termasuk dalam sidang etik terkait dugaan adanya pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Novanto menyusul penahanannya sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MKD juga menyatakan, putusan MKD terkait penonaktifan Novanto tak akan terpengaruh hasil Rapat Pleno DPP Golkar pada Selasa (21/11). Dalam rapat itu, para pimpinan Golkar

menyatakan tak menarik Novanto dari posisi ketua DPR hingga putusan praperadilan yang ia ajukan keluar.

"Itu *kan* kalau domain partai, silakan saja partai memutuskan demikian. Ya, kalau kita memang di luar partai *kan*," ujar politikus Partai Gerindra tersebut. Apalagi, Sufmi memperkirakan, hasil proses praperadilan Novanto juga akan berbarengan dengan hasil verifikasi MKD ke setiap fraksi.

MKD sebelumnya menjadwalkan rapat konsultasi dengan 10 fraksi di DPR untuk membahas nasib Novanto pada Selasa (21/11) sore WIB. Namun, rapat itu dibatalkan karena banyak pimpinan fraksi berhalangan hadir.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politikus senior Golkar juga berpesan agar MKD tetap melakukan fungsi sebagaimana mestinya. "Terserah keputusan mereka. (MKD) *kan* independen, semestinya. Apa baiknya untuk DPR, apa baiknya untuk negara, kita serahkanlah kebijakan ke MKD," ujar Jusuf Kalla di kantornya, Rabu.

Keputusan DPP Partai Golkar mempertahankan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR muncul seiring beredarnya surat bertulisan tangan yang dilayangkan Novanto kepada pimpinan DPR dan DPP Golkar.

Dalam surat itu, Novanto memerintahkan MKD tak memberhentikan sebagai ketua DPR, juga meminta DPP tak memberhentikan secara sementara ataupun permanen dari posisi ketua umum Golkar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan MKD tetap menggelar sidang dugaan pelanggaran Novanto. "Kita tidak berani mengganggu MKD. Memang bisa melakukan rapat, tetapi kalau orangnya bisa diperiksa. Kalau tidak, sulit dibuktikan," ujarnya.

Menurut Fahri, MKD independen dan tidak bisa diintervensi. Namun, sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Fahri menjelaskan, penggantian ketua DPR pada prinsipnya tetap melalui rapat paripurna. "Tidak ada jalan pintas, melainkan sudah diatur prosedur," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai hasil keputusan rapat pleno yang menunda penggantian Novanto sebagai kompromi terbaik. Ia berkeras penggantian ketua umum Golkar ataupun ketua DPR mengharuskan adanya kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPR mengkritisi sikap Partai Golkar

yang tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua DPR.

"Betul, itu hak Golkar, tapi sebaiknya Golkar melihat kondisi objektif bahwa hari ini Novanto tidak bisa melakukan apa-apa, pergantian itu perlu dilakukan," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto kepada *Republika*, Rabu.

Ia memandang persoalan kasus korupsi yang menyeret Novanto adalah persoalan pribadi. Sebab itu, tak adil bila hal itu kemudian menyeret DPR sebagai lembaga. Sedangkan, anggota Fraksi PKB, Lukman Edy, menilai keputusan Golkar telah menyandera DPR.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate juga meminta Partai Golkar bersikap arif. "Inilah waktunya bagi Golkar apabila ingin menjaga dan meningkatkan reputasi DPR. Semakin cepat mengambil langkah untuk menunjuk pengganti, tentu itu akan semakin baik untuk DPR," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana juga menilai keputusan Golkar akan memengaruhi DPR secara keseluruhan.

"Kalau berkenaan dengan citra DPR, tentu ini *kan* ujian paling berat bagi DPR. Sepanjang sejarah DPR, citra DPR sudah tidak karuan di mata rakyat," ujar Dadang, kemarin. ■ *risky jaramaya/ali mansur ed: fitriyan zamzami*



KPK Kebut
Berkas Novanto

Hlm- 9